

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Mulyadi (2007: 23) “menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya dihubungkan dengan kondisi keuangan perusahaan yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut”.

Menurut Bastian (2001: 329), “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi”. Menurut Inpres No 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ‘kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi dan organisasi”.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi, Apabila pencapaian sesuai dengan yang dierncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabil pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dikatakan jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang mwnggunakan indikator keungan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keungan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

2.1.2 Pengertian Keuangan daerah

Menurut undang-undang no. 32 tahun 2004, pasal 26 ayat (1) keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah yang dapat di nilai dengan uang dan segala sesuatu berupah uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” sedangkan menurut keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002, yang sekarang berubah menjadi permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) “semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pada prinsipnya keuangan daerah ,memiliki unsur pokok, yaitu : 1. hak daerah, 2 kewajiban daerah 3. kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Disamping memiliki unsur-unsur pokok diatas, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD), yaitu: suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawaban.

2.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Sedarmayanti (2003: 64) “kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhann, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan”.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan yang dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah demi mewujudkan sasaran, visi dan misi. Kinerja keuangan ini adalah ukuran yang menggunakan indikator keuangan sehingga diperlukan analisis kinerja keuangan.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam megambil keputusan.

2.2 Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mohamad Mahsun (2012:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2012).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Derajat Desantarlisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

Berikut ini rasio untuk menghitung kinerja keuangan:

2.2.1 Derajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi (2015:140),

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Untuk menghitung derajat desentralisasi dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Angka yang diperoleh dari hasil analisis dapat bervariasi. Sehingga diperlukan penilaian untuk mengetahui kriteria derajat desentralisasi. Berdasarkan Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77) kriteria penilaian derajat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria penilaian derajat desentralisasi

Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77)

2.2.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2015:140),

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Untuk menghitung rasio ketergantungan keuangan daerah dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Angka yang diperoleh dari analisis dapat bervariasi. Sehingga diperlukan penilaian untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah. Berdasarkan Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77) Kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77)

2.2.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2011:L-5), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan:

Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Menurut Faud (2016:138), rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan:

Ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Bantuan Daerah} + \text{Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

Melalui analisis tersebut maka akan dihasilkan angka yang bervariasi yang dapat menggambarkan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan Kepdagri

No.690.900.327 tahun 2996 dalam Kamarolellah (2017:132) tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian %
Rendah Sekali	0-25
Rendah	25-50
Sedang	50-75
Tinggi	75-100

Sumber: Kepdagri No.690.900.327 tahun 1996 dalam kamaroellah (2017:132)

Selain kemampuan keuangan daerah dapat diketahui juga pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah menurut Halim (2001:169) dalam Hanik (2014:146) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pola hubungan dan tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25-50%	Konsultatif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber: Halim (2001:169) dalam Hanik 2014:169)

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001:168) dalam Hanik (2014:147), mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- Pola hubungan *Instruktif*, pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- Pola hubungan *Konsultatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonoi.
- Pola hubungan *Partisipatif*, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola hubungan *Delegatif*, campu tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomo daerah.

2.2.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2011:L-5), “Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah”. Untuk menghitung rasio efektivitas PAD dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Angka yang diperoleh dari hasil analisis dapat bervariasi. Sehingga diperlukan penilaian untuk mengetahui tingkat efektivitas PAD. Berdasarkan teori Mahmudi (2015) kriteria penilaian rasio efektivitas PAD dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Standar Rasio Efektivitas PAD

Nilai efektivitas PAD	Persentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

Sumber: Mahmudi, 2015

2.2.5 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.6
Tingkat Efisiensi PAD

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Suber: Mahsun, 187

2.3 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Lazyra KS (2016)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuanagan Kota Medan	kinerja pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan, dan meningkatnya belanja daerah, bahkan melebihi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, rasio kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah daerah Kota Medan dalam meningkatkan PAD, untuk rasio efektivitas yang masih dibawah standar terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut,

			<p>untuk rasio efisiensi yang berada diatas standar terjadi dikarenakan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target.</p>
2	Anim Rahmayati (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Daerah selama Tahun 2012-2015, secara umum dapat dikatakan kurang baik, 2. Dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Dearah selama tahun 2012-2015 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Surabaya dapat dikatakan sangat baik 3. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Kota Surabaya masuk kedalam kategori tinggi dan pola hubungan delegatif yang artinya ketergantungan daerah

			kepada pemerintah pusat sangat rendah
3	Juddy Julian Pilat , Jenny Morasa (2016)	Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015	1. Berdasarkan hasil perhitungan normatif dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Kota Manado berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Ini terlihat dari hasil rata-rata Rasio Kemandirian Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015, berdasarkan pengolahan data yang berasal dari LRA Pemerintah Kota Manado Tahun

			<p>Anggaran 2011-2015 adalah sebesar 20,877%. Ini menunjukkan bahwa, peran Pemerintah Pusat sangat dominan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado. Mengingat peran Pemerintah Pusat yang masih sangat dominan, wajar jika Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kota Manado masih kurang. Ini terlihat dari rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama periode 5 tahun yaitu sebesar 17,240%. Artinya, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang kecil kepada Pemerintah Daerah Kota Manado. Namun, tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Manado</p>
--	--	--	--

			<p>terbilang efektif dan sangat efisien. Ini terlihat dari tingginya nilai rata-rata Rasio Efektivitas yaitu sebesar 99,864% dan rendahnya nilai rata-rata Rasio Efisiensi yaitu sebesar 0,835% selama periode 5 tahun anggaran. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa antar belanja tidak langsung dan belanja langsung belum seimbang. Terbukti dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung daripada belanja yang terkait langsung dengan kegiatan. Semestinya</p>
--	--	--	--

			<p>Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.</p> <p>2. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Manado masih belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan share dan growth terhadap LRA Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015, maka diperoleh nilai rata-rata Share sebesar 18,792% dan rata-rata Growth sebesar 120,503%, sehingga posisi Kota Manado berada pada kuadran II yang berarti berada pada kondisi belum ideal. Hal ini berarti, Pemerintah Daerah Kota Manado masih harus menggali lebih</p>
--	--	--	---

			<p>dalam lagi potensi yang dimiliki daerah, sehingga dapat lebih meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD. Dilihat dari hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kota Manado selama periode 5 tahun, skala indeks menunjukkan angka 0,577 yang berarti kemampuan keuangan Kota Manado tergolong tinggi. Tingginya tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang ditunjukkan pada analisis rasio kemandirian. Hal ini sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan</p>
--	--	--	--

			kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya.
4	Mega Oktavia Ropa (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	<p>1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan efektifitas pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2011-2014 bisa dikategorikan Efektif. Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2011-2014 Kurang Efisien.</p> <p>2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan kemandirian pengelolaan keuangan daerah untuk tahun</p>

			<p>anggaran 2011-2014 masih Rendah, Pemerintah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.</p> <p>3. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan aktifitas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2011-2014 masih rendah karena Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin/operasi dibandingkan untuk belanja pembangunan/modal.</p> <p>4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan</p>
--	--	--	---

			<p>baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan pendapatan, sedangkan untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan masih kurang baik.</p>
5	Anim Rahmayati (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. 2. Efektivitas pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam mengelola pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari 107,71% tahun 2011 menjadi 116,44% pada tahun 2012. 3. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat efisien dalam mengelola pendapatan asli daerahnya, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi sebesar 3,71% pada tahun 2011, 2,60% pada tahun 2012

			dan 2,65% pada tahun 2013.
6	Putri Kemala Dewi Lubis dan Nurlia Hafni (2014)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 – 2013.	Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu dalam memenuhi dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah sekali berdasarkan kriteria penilaian kemandirian daerah menurut Kepmendagri karena berada pada interval 0-25%. Pada rasio aktivitas tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa Pemkab Labuhan Batu masih memprioritaskan anggaran belanjanya untuk belanja ruitn dibandingkan belanja pembangunan. Pertumbuhan PAD pada tahun 2011-2013 menunjukkan kinerja Pemkab Labuhan Batu tidak baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD yang bernilai negatif.

		<p>Pada rasio efektivitas PAD tahun 2011-2012 menunjukkan kinerja Pemkab Labuhan Batu yang sangat efektif tetapi pada tahun 2013 kinerja Pemkab Labuhan Batu tidak efektif dalam merealisasikan PAD yang direncanakan. Pada rasio efisiensi PAD tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa kinerja Pemkab Labuhan Batu sangat efisien karena mampu menekan biaya-biaya yang ditimbulkan dari pemungutan PAD. Secara potensial apabila terjadi kekurangan dana, maka untuk mencukupi kebutuhan belanjanya, Kabupaten Labuhan Batu memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman karena mempunyai DSCR diatas 250% setiap tahun.</p> <p>Beberapa implikasi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi</p>
--	--	--

			Pemkab Labuhan Batu dalam mengambil kebijakan belanja daerah. Karena memiliki ukuran dari kinerja keuangan, sehingga dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusannya.
7	Msy. Mikial (2012)	Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin	Realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin sudah efektif. Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin sebagian besar diprioritaskan untuk mencukupi belanja rutin dan sisanya baru diperuntukkan belanja pembangunan.
8	Afriyanto (2012)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan hulu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tahun 2007-2011 masih sangat rendah, Rasio efektifitas kinerja keuangan tahun 2007 tidak efektif, tahun 2008 menunjukkan bahwa kinerja keuangan cukup efektif, tahun 2009 dan 2010 menunjukkan kinerja keuangan sangat efektif,

			<p>dan tahun 2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah efektif. Rasio efisiensi tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat efisien karena di bawah angka 1%. Rasio aktivitas tahun 2007 dan 2011 menunjukkan bahwa rasio keserasian diprioritaskan untuk belanja rutin. Rasio Pertumbuhan APBD tahun 2007-2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif. Karena mengalami kenaikan dan penurunan di tahun tertentu.</p>
9	Joko Pramono (2012)	Analisis Rasio Keuangan Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)	<p>- Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya</p>

			<p>sebesar 15,83 % (2010) dan 24,44% (2011).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemkot Surakarta sangat efisien di dalam mengelola PAD nya, hal ini bisa di lihat dari hasil perhtingan rasio efisiensi sebesar 27,95% (2010) dan 14,15% (2011) - Jumlah pendapatan dan jumlah PAD mengalami pertumbuhan yang positif, untuk pendapatan naik sebesar 19,92%, sedangkan PAD mengalami kenaikan cukup tinggi yakni sebesar 58,93%. Di lain pihak belanja operasi naik sebesar 14,58% dan belanja modal naik sangat tinggi sebesar 61,03%.
10	Wakhyudi dan Laila Firda Tarunasari (2010)	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah	1. Kemampuan pemerintah Kabupaten Bogor didalam mengelola keuangan daerahnya sendiri

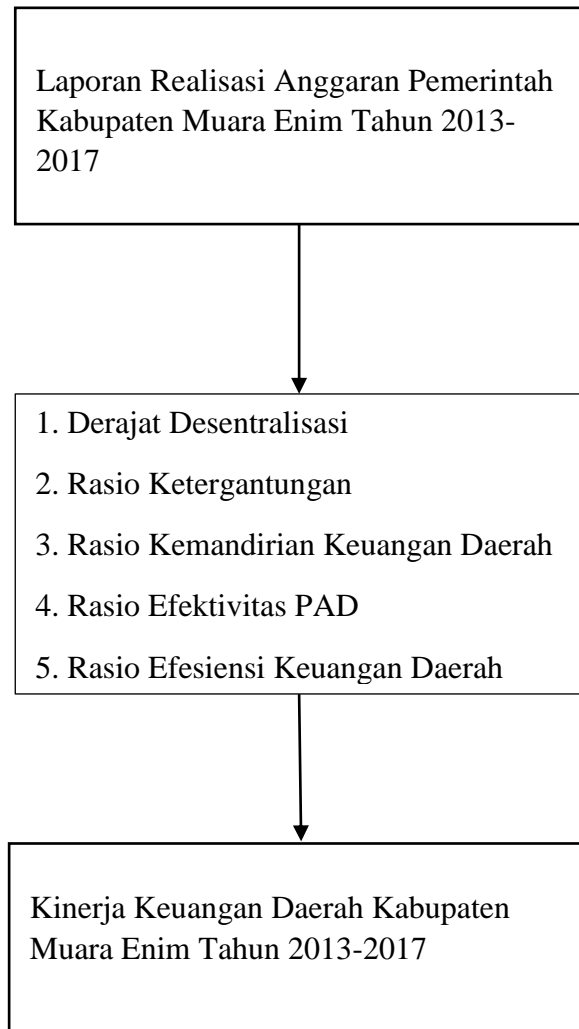
			<p>masih rendah.</p> <p>2. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada beberapa hambatan yaitu:</p> <p>a. Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD hingga Perda Laporan Realisasi APBD setiap tahunnya belum tepat waktu dan penganggarannya belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian intern dapat mengakibatkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung</p>
--	--	--	---

			<p>pada laporan keuangan.</p> <p>c. Belum optimalnya sistem dan mekanisme data dan informasi perkembangan potensi pendapatan daerah dari setiap desa.</p> <p>d. Ketergantungan pada dana ekstern yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat sering kali pencairannya terlambat.</p> <p>e. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik</p>
--	--	--	---

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Analisis Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Dan Ketergantungan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2013-2017'' dan dapat juga dijadikan sebagai bahan referensi atau bukti empiris bagi penelitian selanjutnya.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran